PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja | Hari: Jumat | Tanggal: 25 Februari 2022 | Halaman: 4

TAJUK

Perbaiki Tata Kelola, Swasembada Kedelai Jangan Sekadar Wacana

Kenaikan harga kedelai yang terus terjadi selama beberapa waktu terakhir benar-benar memukul sektor industri rumah tangga, khususnya industri tahu dan tempe. Pemerintah beralasan kenaikan harga ini terjadi seiring berkurangnya pasokan kedelai dari luar negeri sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Di sisi lain, pasokan kedelai lokal ke pasaran juga tidak terlalu banyak.

Berdasar pantauan di sejumlah pasar tradisional di wilayah DIY, saat ini harga kedelai impor berkisar sekitar Rp11.500 per kilogram. Untuk kedelai lokal harganya juga tak terpaut jauh. Meski tak sampai memicu kelangkaan, mahalnya harga komoditas ini sangat berpengaruh terhadap roda usaha sekaligus memengaruhi harga produk lauk utama masyarakat di Indonesia ini.

Produsen tahu dan tempe sudah sejak lama menyuarakan dan memprotes kenaikan harga kedelai yang terus terjadi. Sebagai pengguna utama komoditas, mereka menjadi sektor usaha yang terdampak langsung dengan adanya kenaikan harga ini. Di sisi lain, para perajin harus terus berproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk menyiasati kondisi ini, para perajin di DIY tetap berproduksi dan memilih memperkecil ukuran tahu dan tempe dibandingkan menaikkan harga jual produksi mereka. Sejauh ini, strategi ini bisa membuat para perajin tetap bisa bertahan.

Melihat jauh ke belakang, persoalan kenaikan harga kedelai sejatinya merupakan masalah klasik yang terus terulang hampir setiap tahun. Meski terus terjadi dan berulang, Pemerintah Pusat seolah tak pernah menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Rencana swasembada kedelai yang digaungkan pemerintah beberapa waktu lalu hanya menjadi wacana belaka.

Terlebih, di sektor pertanian budi daya tanaman kedelai sama sekali tak dilirik petani meski harga komoditas ini sangat menggiurkan. Petani memilih menanam padi, kacang, jagung atau komoditas lain yang dinilai lebih mudah. Di sisi lain, ketergantungan terhadap kedelai impor semakin sulit diputus. Pemerintah lebih memilih membuka keran impor sebesar-besarnya dibandingkan menggenjot budi daya tanaman kedelai.

Dalam persoalan ini, pemerintah seharusnya tak boleh terlalu bergantung pada keran impor. Meski sulit dan tidak terlalu diminati, budi daya kedelai harus tetap didorong. Pemerintah bisa memberikan berbagai insentif dan subsidi agar petani kembali bergairah menanam kedelai.

Selain itu, pemerintah harus sedikit demi sedikit mengerem masuknya kedelai impor. Dengan kerja keras semua pihak, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, upaya untuk memperbanyak produksi kedelai bisa segera terwujud.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005